

BAB III

KEIKUTSERTAAN INDONESIA

DI ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

Saat ini dunia telah masuk ke dalam rezim perdagangan bebas. Baik negara-negara maupun organisasi internasional mengukung perdagangan bebas, yang diimplementasikan ke dalam bentuk perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Salah satu perjanjian yang penting dan mempunyai pengaruh cukup besar adalah perjanjian perdagangan bebas Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang berlaku sejalan dengan tahapan-tahapan hingga 2018. Indonesia sebagai bagian dari Asean ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian ACFTA serta bermitra dengan China. Namun ternyata di dalam perjalanan, dampak dari perjanjian perdagangan bebas ACFTA sangat terasa hingga ke sektor-sektor strategis dan dapat mengancam kondisi ekonomi di Indonesia, terutama dengan membanjirnya produk China ke Indonesia.

Dalam bab ini pertama-pertama akan memuat bahasan mengenai latar belakang Indonesia bergabung dalam ACFTA dan tujuan Indonesia bergabung dalam ACFTA, serta kondisi perekonomian Indonesia sebelum bergabung dan setelah bergabung dalam ACFTA.

Maka dari penelitian ini akan terlihat sejauh mana dampak dari perjanjian tersebut dan strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan ACFTA ke depan.

A. Latar Belakang Indonesia Bergabung dalam ACFTA

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa fungsi utama suatu negara dengan perangkat pemerintahannya adalah untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, membebaskan penduduk dari rasa takut, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.³⁴ Pentingnya peranan atau fungsi negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum terutama dalam sistem ekonomi menurut didasarkan paling tidak pada dua alasan. Pertama, timbulnya kegagalan pasar (market failure) dalam sistem ekonomi, membuka kemungkinan masuknya peranan negara untuk mendorong terwujudnya mekanisme pasar yang efektif sehingga kesejahteraan para pelaku ekonomi bisa tercapai secara lebih baik. Kedua, kenyataan terdapatnya kegagalan distribusi pendapatan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranan pemerintah lebih tertuju untuk melakukan kebijakan redistribusi atau pengalokasian kembali sumber-sumber ekonomi. Inilah dasar teoritis dari

³⁴ Arief Budiman. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 29, Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992, hlm. 62 Bahkan Frans Magnis Suseno (1988: 305) mengatakan bahwa *raison d'être* atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah kepentingan umum. Disamping itu, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara (*salus populi suprema lex*)

mazhab *Welfare Economics* yang menjadi basis pembenaran terhadap intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Saat ini Indonesia telah terikat dari beragam perjanjian perdagangan bebas baik bilateral, regional dan multilateral. Dari keterikatan Indonesia dalam beragam perjanjian perdagangan bebas tersebut sebenarnya apa yang menjadi motivasi maksud Indonesia ikut serta dalam beragam perjanjian perdagangan bebas. Setidaknya ada empat motif³⁶ :

Pertama, perasaan tak enak dengan negara lain sebab Indonesia telah tergabung dalam suatu organisasi atau asosiasi seperti ASEAN. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN tentunya Indonesia turut menyukseskan apa yang menjadi program-program dan kebijakan ASEAN termasuk ikut serta menjadi bagian ASEAN bekerjasama dengan negara lain seperti dengan China melalui ACFTA ataupun dengan Australia dan Selandia Baru dalam AANZFTA.

Kedua, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas karena didasarkan untuk mengangkat citra Indonesia di mata masyarakat Internasional hanya karena ingin disejajarkan dengan negara modern lain. Padahal, agar perjanjian Internasional dapat berjalan di dalam negeri, diperlukan proses transformasi ke dalam hukum nasional dan infrastruktur

³⁵ Didik J. Rachbini. *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori dan Perspektif Baru*, Jakarta: CIDES

³⁶ Hikmahanto Juwana, UUD dan Dagang Bebas. Kompas, Rabu 20 April 2011, hlm. 7.

penunjang. Ini merupakan salah satu motivasi Indonesia mengapa ikut serta dalam perjanjian perdagangan bebas.

Ketiga, adalah karena desakan negara atau lembaga keuangan internasional mengingat Indonesia sangat bergantung secara ekonomi pada mereka. Desakan dan dorongan tersebut akan cukup mempengaruhi pertimbangan Indonesia turut serta dalam perjanjian perdagangan bebas, tanpa terlebih dahulu mengkaji berbagai dampak yang timbul dari perjanjian perdagangan bebas, sangat bertolak belakang dengan negara lain yang mengkaji dan melakukan assesment perjanjian perdagangan bebas sebelum negara mereka melakukan penandatanganan.

Keempat, mengikuti suatu perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas semata-mata karena proses tersebut telah dianggarkan tanpa persis tahu kegunaan dan manfaat yang akan dihasilkan.

Empat motif tersebut sebenarnya menafikan fakta bahwa perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara lain sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional mereka. Belum lagi perjanjian internasional kerap dimanfaatkan untuk mengintervensi kedaulatan hukum suatu negara sesudah era kolonialisme berakhir. Melalui perjanjian internasional dapat dipastikan bahwa hukum suatu negara seragam dalam derajat tertentu dengan hukum negara lain.

Perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas pada dasarnya dimanfaatkan oleh negara yang memiliki produsen untuk menghilangkan atau mengecilkan hambatan yang terdapat dalam negara yang

memiliki konsumen dan pasar. Saat ini pun tidak hanya barang dan jasa tetapi juga hak kekayaan intelektual, untuk itu keseragaman aturan terkait dengan hak kekayaan intelektual pun diatur dalam perjanjian perdagangan. Pada intinya agar hak atas kekayaan intelektual yang telah diakui di suatu negara mendapat perlindungan di negara lain, bahkan tidak dibajak di negara tersebut.

Perjanjian perdagangan seperti perjanjian perdagangan bebas akan sangat menguntungkan bagi negara yang memiliki kebijakan mendorong pelaku usaha untuk pelaku usaha melakukan ekspansi ke pasar negara lain. Namun tidak sebaliknya bagi negara yang pelaku usahanya masih terkonsentrasi dengan pasar dalam negeri, atau justru mendapat berbagai rintangan dari atau tidak terfasilitasi oleh pemerintahnya sendiri dalam melakukan ekspansi ke luar.

Indonesia juga selaku negara ASEAN dengan populasi dan pasar terbesar memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan China. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan Republik Rakyat China mengenai *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* ("Framework Agreement"), yang ditandatangani di Phnom Penh, pada 4 November 2004. *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the*

People's Republic of China yang selanjutnya disebut Perjanjian ACFTA berlaku sejak 1 Januari 2010.

Hubungan Indonesia dengan China sejak 65 tahun silam yang resmi dijadikan hubungan diplomatik merupakan komitmen nyata kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hubungan Indonesia dengan China berlangsung dari era Soekarno meskipun sempat membeku dan mencair era Soeharto sampai era Jokowi. Jadi keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA merupakan upaya pemerintah dalam bidang ekonomi yang berupaya untuk mensejahterakan rakyat.

B. Tujuan Indonesia bergabung dalam ACFTA

Keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA mempunyai berbagai tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia

Dengan adanya kawasan perdagangan bebas yang merupakan bagian dari perdagangan internasional ikutsertanya Indonesia dalam perdagangan bebas ACFTA diharapkan Indonesia dapat membuka pasar kepada negara lain kepada negara anggota ASEAN dan China tanpa hambatan baik tarrif maupun non tarrif sehingga Indonesia dapat melakukan peningkatan ekspor terhadap negara lain. Dengan memasuki pasar-pasar negara anggota ASEAN dan China berarti pelaku usaha Indonesia menambah pasar dan menambah keuntungan yang diharapkan dapat mendorong perekonomian di Indonesia.

Selain itu, pembentukan kawasan perdagangan bebas ACFTA diharapkan dapat menjadi sarana transfer teknologi modern.³⁷ Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.³⁸ Jadi negara Indonesia diharapkan dapat mempelajari cara manajemen teknik produksi yang efisien dan cara-cara yang lebih modern dari negara anggota ASEAN lainnya dan China. Para pelaku usaha Indonesia dapat menambah ilmu pengetahuannya dengan adanya transfer teknologi, sehingga membantu pelaku usaha Indonesia memajukan bisnis mereka. Dalam rangka pembentukan ACFTA juga ditandatangani Perjanjian Investasi, dengan adanya perjanjian ini diharapkan kemungkinan akan semakin banyaknya investor terutama dari China untuk berinvestasi ke Indonesia. Salah satu perjanjian yang ditandatangani dalam ACFTA yaitu Perdagangan Jasa yaitu sektor pariwisata.³⁹ Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia diharapkan dapat lebih memajukan sektor pariwisata. Penghasilan pariwisata juga menjadi sumber devisa negara yang penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi.⁴⁰ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

³⁷ Pasal 7 ayat 3 framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China.

³⁸ Ibid

³⁹ Pasal 7 ayat 2 framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN

and the People's Republic of China.

⁴⁰ Amir M.S., op.cit, hal 101, dan I Putu Gelgel, op.,cit hal 24.

keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA dapat mendorong perekonomian Indonesia.

2. Meningkatkan devisa negara

Dengan meningkatnya perdagangan luar negeri, penanaman modal atau investasi maka dapat meningkatkan devisa negara Indonesia. Karena ACFTA mendorong pertumbuhan perekonomian dengan dipermudahnya ekspor produk asal Indonesia ke negara anggota ASEAN dan China karena tidak adanya hambatan tarif maupun non tarif serta adanya perjanjian investasi.

Menurut Amir MS, sumber-sumber devisa dari suatu negara yaitu :⁴¹

- a) Hasil dari ekspor barang maupun jasa.
- b) Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri baik dari pemerintah suatu negara,
- c) badan-badan keuangan internasional, ataupun dari swasta.
- d) Hadiah dari negara asing.
- e) Keuntungan dari penanaman modal diluar negeri.
- f) Hasil-hasil dari devisa pariwisata internasional.
- g) Imbalan dari jasa tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
- h) Kegiatan ekspor baik barang dan jasa, investasi, pariwisata yang merupakan Sumber devisa negara diharapkan akan lebih mudah karena

⁴¹ Ibid

adanya ACFTA karena semua telah diatur dalam kerangka perjanjian ACFTA.

3. Menciptakan persaingan

Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya dari hasil produksinya sendiri, Begitu juga Indonesia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya dari hasil produksinya sendiri. Jadi adanya ketergantungan suatu negara pada negara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan memperhatikan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya, maka dengan penghapusan hambatan baik tarrif maupun non tarif, maka leluintas antara negara lebih bebas. ACFTA diharapkan dapat mendorong setiap pelaku usaha untuk memproduksi komoditi yang paling menguntungkan dan memiliki daya saing. Dan pada gilirannya pasar dalam negeri Indonesia dipenuhi oleh produk dari negara anggota ASEAN dan Cina sehingga menciptakan persaingan antara pelaku usaha.

4. Menciptakan kepastian hukum

Dalam pembagunan ekonomi, hukum itu dapat berperan bila hukum mampu menciptakan “stability, predictability, fairness”. Adapun yang termasuk dalam stability yaitu potensi hukum menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing. Dapat meramalkan akibat dari suatu langkah yang diambil khususnya penting bagi negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan ekonomi melampaui lingkungan tradisional adalah merupakan fungsi suatu hukum, dan aspek keadilan yaitu seperti

perlakuan yang sama dari standar pola tingkah laku pemerintah diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan birokrasi yang berlebihan.

Maka dikaitkan dengan ACFTA merupakan produk hukum, maka ketentuan yang tertuang didalam ketentuan ACFTA diharapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor impor yang tingkat tarifnya lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan negara lain.

Maka adanya ACFTA diharapkan para pelaku usaha Indonesia dapat memprediksi produk apa saja dari Indonesia yang dapat bersaing, memperkirakan besarnya tarif yang harus dibayarkan, menentukan asal barang impor yang beredar di Indonesia dan kegiatan lainnya dari kegiatan ekspor impor. Produk yang belum mampu bersaing dari masing pihak dalam perjanjian dapat dimasukkan kedalam ketentuan yang dikecualikan didalam perjanjian ACFTA. Indonesia juga harus melakukan harmonisasi hukum dan ketentuan perundang-undangan dengan cara mensahkan dan meratifikasi hukum tentang ACFTA sehingga menciptakan kepastian hukum.

5. Memperkuat hubungan antar negara

Masing-masing pihak dalam ACFTA mempunyai spesifikasi yang berbeda dalam sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya. Diharapkan dengan adanya ACFTA dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara anggota ASEAN dan Cina yang sehingga dapat berimbas hubungan kerjasama bukan hanya dalam konteks ekonomi saja tetapi politik, budaya, dan pertahanan.

C. Kondisi Perekonomian Indonesia

Perjanjian kerja sama ekonomi antara *Association of Southeast Asian Nations (Asean)* dan *China (ACFTA)* ditandatangani pada tanggal 4 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja oleh para Kepala Negara ASEAN dan Republik Rakyat China. Kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak akan mempengaruhi kedua kawasan tersebut. Demikian juga bagi Indonesia, di masa mendatang akan semakin dipengaruhi hubungan ekonomi internasional, yang berupa kesepakatan ekonomi bilateral, regional dan multilateral serta konvensi dan perjanjian internasional. Perkembangan ekonomi dan perdagangan dengan China yang mempunyai pertumbuhan tinggi dan menjadi kekuatan baru akan sangat mempengaruhi perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Negara-negara tersebut mulai menuju sebagai negara yang mempunyai keunggulan komparasi dalam produk-produk tertentu. Produk-produk mereka telah masuk di berbagai negara di dunia ini termasuk Indonesia. Struktur perekonomiannya mulai meninggalkan sektor pertanian menuju industrialisasi dan mulai banyak menanamkan modalnya di berbagai negara.

Awal tahun 2010 dimulai dengan pemberlakuan ACFTA atau *ASEAN-China Free trade Area*. Pro dan kontra mengenai pemberlakuan ACFTA marak diperbincangkan. Sebagian masyarakat menganggap ACFTA sebagai tantangan bagi Indonesia untuk maju, namun sebagian lainnya menganggap ACFTA sebagai suatu kerugian besar bagi industri-industri dalam negeri. ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota

ASEAN dengan china untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambata-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Perkembangan ekonomi perdagangan Indonesia dan China banyak mengalami pasang surut. Naik turun hubungan ekonomi dagang kedua negara karena di pengaruhi beberapa permasalahan seperti faktor sosial ekonomi dan politik. Sejak negara China mengubah haluan menjadi negara terbuka maka Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi, investasi dan perdagangan dengan negara China. Jalinan ekonomi dan perdagangan ini kemudian diimplementasikan melalui bentuk kerjasama ekonomi baik bilateral maupun regional. Salah satu diantaranya adalah kerjasama regional ASEAN dengan China. Tentu saja perkembangan China yang sangat pesat saat ini menjadi peluang dan tantangan khususnya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industri dinilai selalu memiliki nilai tukar yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan produk-produk sektor lain (Dumairy, 1997:227).

Hingga saat ini, sektor industri telah memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan ekspor dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Ini

memberikan arti bahwa kontribusi pertumbuhan nasional dari sektor industri masih sangat besar. Dengan demikian, apabila kinerja pada sektor industri ini mengalami gangguan, maka secara tidak langsung perekonomian nasional juga ikut terganggu.

Seperti yang sudah terangkum dalam tabel 1.1, jumlah ekspor yang paling besar selama periode tahun 2001 hingga tahun 2008 adalah pada sektor industri.

**Tabel 3.1 Nilai Ekspor Non Migas Indonesia (menurut sektor)
tahun 2001- 2008 (US\$ juta)**

NO	SEKTOR	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Sektor Pertanian	2.438,5	2.568,3	2.526,1	2.506,6	2.889,4	3.374,1	2.657,8	4.584,6
2	Sektor Pertambangan	3.569,6	3.743,7	3.995,6	4.761,4	7.946,8	11.191,5	11.884,9	14.906, 2
3	Sektor Industri	38.671,1	38.729,6	40.677,3	48.677,3	55.584,4	65.014,7	76.460,8	88.393, 5
4	Komoditi Sektor Lainnya	5,4	4,5	5,2	4,4	7,8	8,9	8,8	9,9

Sumber: Situs Resmi Departemen Perdagangan Indonesia (www.depdag.go.id) (diolah penulis)

Industri yang selama ini cukup menjadi andalan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia adalah industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Sebagai salah satu negara produsen dan eksportir produk-produk tekstil, Indonesia

memandang bahwa perdagangan dunia merupakan peluang yang cukup terbuka bagi kegiatan ekspor produk-produk tekstil. Di sisi lain hal ini dipandang sebagai tantangan untuk meningkatkan daya saing agar dapat menghasilkan produk-produk tekstil yang semakin kompetitif di pasar internasional.

Peningkatan daya saing produk merupakan tantangan terbesar bagi industri TPT Indonesia, terutama untuk menghadapi era perdagangan bebas. Mengingat iklim persaingan yang semakin ketat, ditambah lagi dengan sudah tidak diberlakukannya pasar kuota menyebabkan industri TPT Indonesia mendapat ancaman yang serius dari negara-negara yang juga merupakan produsen tekstil negara China.

Table 3.2 Perkembangan Ekspor Produk Non Migas Menurut Negara

Tujuan

Kawasan ekspor	Tahun		
	2009	2010	2011
• Asia Timur	3687,9	3277,8	3514,5
a) Jepang	1250,2	1299,2	1208,6
b) China	1206,8	1010,9	1161,1
• Asia selatan dan Tenggara	3720,2	2769,0	3853,4
a) Thailand	274,3	296,4	440,6
b) Singapura	713,8	655,1	887,7
c) Philipina	226,2	195,2	346,2
d) Malaysia	730,3	597,7	979,3
• Asia barat	440,0	330,9	502,3
• Afrika	388,1	208,1	313,2
• Australia dan oseania	197,8	197,9	273,9
• Amerika utara	1091,7	1038,9	1337,1
a) Amerika serikat	1044,1	991,1	1262,0
• Amerika tengah dan selatan	225,1	181,9	287,7
• Eropa barat	1388,6	1126,1	1736,6
• Eropa timur	155,8	120,4	208,4
Jumlah	10	9 251,0	11
	845,2		991,2

Sumber : BPS diolah kementerian Perdagangan, Januari 2012

Berdasarkan tabel “Perkembangan Ekspor Produk Non Migas Menurut Negara Tujuan”, perkembangan ekspor non migas Indonesia ke berbagai negara tujuan mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 10.845,2 menjadi 9251,0 ditahun 2010. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan produksi Indonesia sebagai akibat dari krisis global yang terjadi pada 2008-2010 akan tetapi memasuki tahun 2011 kemampuan produksi Indonesia secara umum mengalami peningkatan menjadi 11.991,2.

Secara khusus, ekspor non migas Indonesia ke Asia timur merupakan salah satu kawasan yang menjadi tujuan ekspor Indonesia terbesar, salah satunya negara China apalagi hal ini didukung dengan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia-China.

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang terpenting dalam menopang perekonomian nasional, sektor industri ini juga sangat berpengaruh pada kelancaran aktivitas ekspor impor Indonesia. Dari sekian banyak industri tekstil, hal tersebut merupakan industri yang sangat berpengaruh, hal ini mengingat bahwa industri tersebut memiliki kapasitas industri yang sangat besar, baik dari sudut pandang produksi dan kebutuhan atau konsumsi masyarakat.

Industri tekstil Indonesia berdasarkan golongan produk berupa serat dan benang sintetis, pakaian dan asesorisnya, kapas, benang dan barang dari padanya, selimut, linen, barang perabot lainnya, penutup dan pelapis dari bahan tekstil, serat nabati, benang kertas, dan barang dari padanya, karpet dan permadani, kain rajutan, kain tenunan, berjumbai dan sulaman, pakaian

bekas, wol, benang dari bulu hewan dan barang dari padanya, sutra dan kain tenunan dari sutra.⁴²

Industri tekstil sangatlah rentan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah seperti kebijakan perdagangan bebas antara Indonesia dan China atau ACFTA, hal ini sangat jelas bahwa aktivitas ekspor Indonesia akan dipengaruhi oleh impor dari China. Berikut beberapa tabel ekspor impor Indonesia-China sebelum adanya dan setelah bergabung dengan ACFTA.

C.1. Sebelum bergabung dengan ACFTA

Tabel 3.3 Data Perdagangan Ekspor-impor Tekstil (TPT) Indonesia ke China Periode 2007-2009

Flow	Nilai US\$		
	2007	2008	2009
Ekspor	162,088,484	175,116,118	180,617,348
Impor	348,852,858	1,034,736,272	1,038,771,012

Sumber : BPS diolah Kementerian Perdagangan Direktorat Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa sebelum adanya ACFTA, ekspor-impor industri tekstil ke China setiap tahun telah mengalami peningkatan namun hanya sedikit. Sedangkan untuk impor, pada tahun 2008

⁴² Rahbia. *Pengaruh Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap Industri tekstil Indonesia*, Skripsi Hubungan Internasional, Universitas hasanuddin, 2011

sebesar 1,034,736,262 dan telah naik menjadi 1,038,771,012 di tahun 2009. Peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2007-2009 menandakan bahwa aktivitas ekspor impor antara China dengan Indonesia untuk sektor industri sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

C.2. Setelah bergabung dengan ACFTA

Walaupun perjanjian ACFTA telah dibicarakan mulai tahun 2002 namun melalui berbagai tahapan yang sangat panjang dan baru mulai resmi di implementasikan pada tanggal 1 Januari 2010. Perjanjian ini sangat mempengaruhi keadaan industri-industri domestik Indonesia khususnya dua industri besar yang ada di Indonesia yaitu TPT dan alas kaki, perubahan nilai ekspor impor tiap tahunnya akan membawa pengaruh terhadap kestabilan ekonomi di Indonesia, hal ini bisa dilihat mulai dari sebelum dan sesudah adanya ACFTA. Beberapa tabel kegiatan ekspor dan impor industri TPT setelah bergabung dengan ACFTA.

Tabel 3.4 Data Ekspor impor Industri TPT Periode 2010-2011

Flow	(Nilai US\$)	
	2010	2011
Ekspor	9,18	11,12
Impor	3,32	8,6

Sumber: BPS diolah Kementerian Perdagangan RI

Dari tabel “Data Ekspor impor Industri TPT Periode 2010-2011” menunjukkan bahwa industri tekstil setelah diberlakukannya ACFTA dari tahun terjadi peningkatan ekspor dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 9,18 menjadi 11,12. Sedangkan nilai impornya juga mengalami lonjakan yang sangat tinggi dari 3,32 menjadi 8,6. Hal ini menandakan bahwa peningkatan impor pada tahun yang sama tidak sejalan dengan peningkatan ekspor, perbedaan impor dari tahun sebelumnya sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa tekstil buatan China lebih diminati oleh masyarakat dalam negeri.

ACFTA merupakan perwujudan dari konsep interdependensi antarnegara, khususnya negara-negara anggota ASEAN dan China. Hal ini khususnya terwujud dalam hal interdependensi ekonomi, dimana tiap-tiap negara memiliki spesialisasi masing-masing dalam memproduksi komoditas tertentu sehingga akan lebih efisien bagi negara-negara tersebut apabila melakukan ekspor dan impor perdagangan. Selain itu, peluang pasar beserta ikatan geografis juga menjadi faktor utama interdependensi negara-negara ASEAN dan China. China melihat peluang pasar yang besar dari negara-negara anggota ASEAN, begitu pula sebaliknya negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) juga melihat peluang pasar yang besar dari China. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari tercetusnya ide ACFTA.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah apakah ACFTA dalam implementasinya memang membawa dampak baik bagi perekonomian setiap negara anggota seperti apa yang diekspektasikan sebelumnya. ACFTA

merupakan area perdagangan bebas terbesar di dunia dengan 1.9 milyar populasi yang sejumlah dengan 30% populasi dunia. Total perdagangan mencapai 1.2 trilyun US\$. Volume perdagangan bilateral naik sebesar 38,9% per tahun mencapai US \$ 105.900.000.000. Dengan diimplementasikannya ACFTA, impor dan ekspor diharapkan akan meningkat sebesar 50%. China merupakan negara ketiga terbesar sumber impor ASEAN. Impor dari China mencapai senilai 107 miliar US\$. China merupakan negara terbesar kedelapan investor ASEAN dengan akumulasi investasisebesar 6.1 miliar US\$ pada tahun 2008, sementara akumulasi investasi ASEAN pada tahun 2008 sebesar US\$5.6 milyar.⁴³

Setelah melihat tabel-tabel yang telah dipaparkan, perkembangan produk tekstil China yang dipasarkan di Indonesia pasca implementasi ACFTA berbeda dengan sebelum adanya pemberlakuan ACFTA. Sebab, sebelum adanya pemberlakuan ACFTA, produk tekstil China yang dipasarkan di Indonesia maka akan dikenakan pajak masuk barang import, sedangkan dalam perkembangannya, setelah adanya pemberlakuan ACFTA dengan penghapusan tarif masuk barang import maka produksi tekstil Cina yang dipasarkan di Indonesia semakin banyak.

⁴³ Data dari Kementerian Perdagangan
http://www.kemendag.go.id/statistik_neraca_perdagangan_dengan_negara_mitra_dagang/
Diakses pada tanggal 12 Januari 2017

Kemudian pasca implementasi ACFTA pada tahun 2010, produk tekstil China meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa produksi tekstil China memberikan perkembangan dalam pasar Indonesia.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, pelaksanaan ACFTA (terutama perdagangan China dengan Indonesia) telah membuat nilai impor produk industri China di 2010 naik 45% menjadi US\$ 20,42 miliar dibanding tahun 2009.

Sebelum itu yaitu pada tahun 2004 jumlah ekspor Indonesia masih berada di atas jumlah impornya dengan China, namun sejak tahun 2007 hal yang terjadi justru sebaliknya, yaitu jumlah impor dari China menjadi lebih tinggi dari pada jumlah ekspor yang berujung pada terjadinya defisit neraca perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bertendensi semakin tergantung dengan impor barang dari China.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi para pelaku produsen Indonesia agar mampu memproduksi barangnya dengan harga yang lebih bersaing lagi. Perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Asean dan China mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Pemerintah tidak mengundur berlakunya atau pelaksanaan perjanjian ACFTA tersebut sesuai yang telah di sampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan dalam salah satu kutipan di surat kabar atau media masa Indonesia.⁴⁴ Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memupuk dan memperkuat kemitraan dengan China, yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai dan memahami.

⁴⁴ “303 Produk Industri Dilindungi”, *Republika*, 16 Desember 2002.

Berbagai pendapat pro dan kontra mengenai ACFTA telah sering bermunculan di publik. Sebagian pihak berpendapat bahwa sejumlah sektor di Tanah Air belum siap menghadapi pemberlakuan penuh ASEAN-China FTA mulai 1 Januari 2010,⁴⁵ sebagian lainnya mengatakan perdagangan bebas merupakan tahapan dalam era globalisasi yang mau tidak mau kita pasti harus menghadapinya. Pihak Industri dalam negeri mengajukan keberatan dan concern mereka dan menuntut pemerintah agar menunda pemberlakuan ACFTA, dikarenakan apabila kerjasama ini tetap dilaksanakan mereka akan kalah bersaing dengan produk asal negeri tiongkok tersebut dari segi harga yang lebih murah dibandingkan produk dalam negeri.⁴⁶

Pada akhirnya ACFTA akan berdampak pada penutupan sejumlah pabrik yang secara langsung terjadi pemutusan hubungan kerja yang meningkatkan jumlah pengangguran dan dampak yang lebih buruk adalah krisis sosial yang berkepanjangan.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Andri Gilang Nugraha, SE, M.Fin; “*Tantangan Dan Peluang Serta Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)*”; Jakarta. di akses pada tanggal 2 Januari 2017